

21 Maret 2013

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

5 Februari 2013 mungkin merupakan hari paling penting dalam sejarah APP. Pada tanggal tersebut kami mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan, dengan bagian yang paling signifikan yaitu komitmen dihentikannya dengan segera pembukaan hutan alam di seluruh rantai pasokan kami. Hal ini berarti kami mencapai target ini dua tahun lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan di *Sustainability Roadmap Vision 2020*, yang kami luncurkan di bulan Juni 2012.

Kami juga mengumumkan bahwa seluruh Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, termasuk yang terletak di lahan gambut, akan dilindungi; bahwa penilaian hutan dengan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock*) akan dilakukan, dan bahwa APP akan mengadopsi praktek terbaik untuk keterlibatan dengan masyarakat adat. Dan, hal yang paling penting, bahwa semua aktivitas pemantauan terhadap pengimplementasian kebijakan ini akan dilakukan oleh LSM independen.

Salah satu mitra penting kami dalam pengimplementasian kebijakan kami adalah The Forest Trust (TFT). Mereka telah berkomitmen untuk mengeluarkan laporan bulanan yang akan mencakup kemajuan yang dicapai pada tiga aspek utama dari kebijakan kami – analisa hutan dengan HCV dan HCS; pengelolaan lahan gambut; dan proses keterlibatan sosial dan masyarakat. Dengan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa laporan pertama TFT telah diterbitkan dan dapat Anda akses di www.tft-forest.org dan www.asiapulppaper.com.

Kami menyambut baik komentar, kontribusi, pertanyaan dan kritik Anda, Hal ini merupakan proses yang sepenuhnya transparan bagi kami, dan kami sadar bahwa perjalanan kami masih panjang, dimana kami akan membutuhkan setiap dukungan dan saran yang dapat Anda berikan, Laporan TFT akan terus diterbitkan setiap bulan, dan kami juga akan menyediakan laporan kemajuan yang komprehensif dan mendetail – di bulan Juni 2013.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan menghubungi kami di environment@app.co.id.

Hormat kami,

Aida Greenbury

Managing Director Sustainability & Stakeholder Engagement, APP Group

Laporan Kemajuan TFT/APP untuk Februari 2013

Tanggal: 20 Maret 2013

Laporan ini merupakan laporan pertama dari laporan reguler dari TFT mengenai kemajuan APP dalam memenuhi komitmen “*Zero Deforestation*”, yang dibuat pada tanggal 5 Februari sebagai bagian dari Laporan Kemajuan Sustainability Roadmap Visi 2020.

APP mengumumkan penghentian segera atas semua pembukaan hutan alam dalam rantai pasokannya di Indonesia, efektif mulai 1 Februari 2013. TFT bekerja sama dengan APP di lapangan untuk melaksanakan dan memantau pekerjaan ini. TFT memahami bahwa ada minat besar dari berbagai pihak tentang kemajuan APP dalam menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) sehingga, daripada menunggu laporan kemajuan yang dilakukan setiap 3 bulan, kami telah memutuskan untuk melaporkan status pekerjaan yang dilakukan di lapangan secara lebih reguler.

Laporan Secara Keseluruhan

Bulan Februari ini merupakan bulan dengan aktifitas yang sangat padat. Namun, kami dapat menyampaikan bahwa moratorium penebangan hutan yang disetujui oleh semua pemasok, masih terus dipatuhi. Selain itu proses penyampaian keluhan – yang dirancang untuk memungkinkan masyarakat dan LSM untuk melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan FCP – telah diuji dengan respon yang positif dari pelapor.

Sebelum pengumuman FCP pada 5 Februari, APP dan TFT telah mengembangkan serangkaian protokol untuk mengatur tata cara pelaksanaan FCP. Keterlibatan awal dengan LSM lokal di Indonesia dipandang penting untuk mengembangkan pendekatan multi-pihak yang kuat. Untuk itu, APP dan tim TFT telah berpartisipasi dalam serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) diseluruh Indonesia, dengan bertemu dengan perwakilan LSM lokal. FGD difokuskan pada keseluruhan maksud dan detail di balik kebijakan FCP ini; yaitu proses pemantauan dan rincian data yang akan dilaporkan. Pertemuan tersebut akan menjadi bagian yang terus berlanjut dari program kerja ini. FGD yang terakhir untuk putaran pertama dari konsultasi dengan pemangku kepentingan akan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013, dimana APP dan TFT akan membahas semua masukan yang diterima selama pertemuan regional.

Kemajuan Kebijakan Komitmen

Kebijakan komitmen 1:

Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) dan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (HCS)

APP dan pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang tidak berhutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen.

1. Moratorium pembukaan lahan hutan: TFT, APP dan para pemasoknya telah bekerja sangat aktif di lapangan dalam mengimplementasikan protokol untuk memastikan moratorium pembukaan lahan hutan terus dipatuhi. Tim kami telah:
 - a. Menandai dan mencatat batas izin pembukaan lahan hutan dengan data GPS untuk semua konsesi yang memasok APP dengan kayu dari hutan alam, yang ditebang hingga 31 January 2013;
 - b. Menginventarisasi dan memetakan lokasi semua stok kayu hutan alam dalam rantai pasokan APP yang ditebang sebelum 2013. Lebih dari satu juta meter kubik serat kayu, berlokasi di berbagai tempat penyimpanan kayu, telah dicatat. Dalam bulan-bulan yang akan datang, kayu-kayu tersebut akan dikirimkan ke pabrik APP. Target yang dijadwalkan agar seluruh kayu tersebut sampai di pabrik APP adalah akhir bulan Agustus 2013, tapi ini akan tergantung pada cuaca, ketersediaan kontraktor dan infrastruktur jalan yang memadai. Kemajuan terhadap target ini akan terus dilaporkan.
 - c. Menginventarisasi lebih dari 570 alat pencabut kayu; dan
 - d. Mengembangkan sistem pelacakan kayu dan melatih petugas yang relevan dalam menggunakan sistem untuk memastikan bahwa hanya kayu yang berasal dari tempat penyimpanan kayu, dan tercatat sebagai kayu yang telah dipanen sebelum 31 Januari 2013, dapat memasuki rantai pasokan.

2. Penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) saat ini sedang berlangsung untuk 38 pemasok APP (mulai dari lahan terbuka hingga sisa hutan alam dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah sepenuhnya didirikan), dengan fase penyelesaian antara September 2013 dan Maret 2014.

3. Karena APP saat ini akan melindungi daerah-daerah yang sebelumnya memasok perusahaan dengan serat dari hutan alam, maka sesungguhnya pekerjaan juga telah dimulai untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang rendah karbon sebagai salah satu cara alternatif.
 - a. Penilaian di lapangan dan penilaian melalui udara (*flyovers*) telah berlangsung di tiga konsesi di Sumatera Selatan (Sebangun Bumi Andalas, Bumi Mekar Hijau dan Bumi Andalas Permai).
 - b. Penilaian di wilayah-wilayah konsesi tersebut adalah untuk mengidentifikasi potensi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan nilai stok karbon tinggi pada belukar tua / hutan yang tumbuh kembali dan pada hutan yang sudah ditebang atau lahan terbuka.
 - c. *Focus group discussions* pada tingkat kecamatan dan desa dilakukan untuk memperkuat proses pengumpulan data. Konsultasi pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten dan provinsi telah dijadwalkan untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dari hasil penilaian.

4. Untuk mendukung identifikasi hutan dengan stok karbon tinggi (HCS) yang harus dilindungi, tim telah memperoleh data satelit SPOT 5 terkini. Analisis ini dilakukan untuk mengklasifikasikan lahan di seluruh wilayah yang memasok APP. Pada saat ini, data yang mencakup 70% dari basis pasokan APP telah diproses. 30% sisanya akan diproses hingga

akhir Mei 2013. Dimana hutan HCS telah diidentifikasi, tim ini akan melakukan proses dua-tingkat yaitu penelitian di lapangan dan pengambilan sampel persediaan (*inventory sampling*).

5. Untuk mendukung kepatuhan pemasok dan pemantauan dari pihak ketiga, TFT dan APP telah mengembangkan satu set protokol: Pemantauan Pelaksanaan Moratorium, Peran Pengamat Independen, Penyampaian Keluhan, dan Pengembangan Wilayah Baru. APP dan TFT telah mencari masukan untuk protokol-protokol tersebut dari komunitas LSM Indonesia di Jakarta, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kunjungan pemantauan sedang dilakukan sebagai bagian dari proses pemetaan batas hutan (lihat butir 1 di atas) dan kami mengantisipasi bahwa partisipasi LSM dalam proses pemantauan akan dimulai pada April 2013.
6. Sebuah Komite Moratorium telah dibentuk untuk menentukan rencana aksi dan / atau tingkat tindakan disipliner untuk setiap ketidakpatuhan yang ditemukan.

Kebijakan Komitmen 2:

Pengelolaan Lahan Gambut

APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca.

1. Pemimpin tim penilai HCVF membentuk tim yang terdiri dari ahli-ahli gambut nasional dan internasional untuk mendukung proses penilaian HCVF. Tim tersebut akan menyusun sebuah protokol, metodologi dan akan memantau seluruh pekerjaan. Tim tersebut juga akan memberikan penjelasan terhadap rekomendasi dan tindakan korektif untuk mengimplementasikan rencana perlindungan hutan dan pengelolaan lahan gambut. Tim tersebut dijadwalkan untuk mulai bekerja pada April 2013.

Kebijakan Komitmen 3:

Keterlibatan Sosial dan Masyarakat.

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, untuk menerapkan prinsip-prinsip diantaranya *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, dan menghormati hak asasi manusia.

1. Untuk mendukung penerapan FPIC pada masyarakat adat dan komunitas lokal, pelatihan awal tentang FPIC untuk para karyawan dari pemasok APP telah dilakukan di Sumatra Selatan, Jambi dan Riau. Pelatihan di Kalimantan Barat dan Kalimantan dijadwalkan untuk dilakukan pada minggu ketiga Maret.
2. Untuk membantu adanya penanganan keluhan yang bertanggung jawab, APP telah menyusun prosedur penyampaian keluhan. Protokol ini telah disosialisasikan di Jakarta,

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi dan Sumatra Selatan. Sosialisasi level nasional akan dilakukan pada tanggal 27 Maret. LSM berbasis di Riau dan Sumatra Selatan telah secara aktif berpartisipasi dalam penerapan Prosedur Penyampaian Keluhan APP (*APP Grievance Procedure*) untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan pada bulan Februari – Maret 2013.

3. TFT dan APP telah menyusun draf prosedur untuk penyelesaian konflik yang bertanggung jawab. Modul-modul yang relevan dengan pelatihan pemetaan konflik telah dikembangkan, dan pelatihan tersebut telah selesai dilakukan di Jambi dan Riau. Sebuah draf juga telah disosialisasikan untuk mendapatkan masukan lebih lanjut di daerah-daerah tersebut.
4. TFT terus bekerja sama dengan APP, tim dari Kementerian Kehutanan dan komunitas lokal dan para perwakilannya untuk menyelesaikan konflik di Jambi. Hal ini mencakup diskusi dengan PPJ dan kepala Dinas Kehutanan Jambi. TFT juga telah memulai dukungan terhadap proses penyelesaian konflik di PT. FSPI. TFT telah melakukan komunikasi dengan PT. Arara Abadi, sebuah LSM lokal (Scale Up) dan Dewan Kehutanan Nasional.
5. Konflik di bulan Januari 2013 di Pulau Muda, area konsesi PT Arara Abadi di Riau, telah selesai, dengan semua pihak yang terlibat telah menandatangani sebuah persetujuan.
6. APP telah meninjau kembali kebijakan CSRnya melalui studi jejak sosial (*social footprint study*). Hasil dan rekomendasi dari studi tersebut akan digunakan untuk semakin meningkatkan kebijakan CSR APP.

Kebijakan Komitmen 4: Pemasok Kayu Lainnya

Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

1. Sebagian besar dari pekerjaan yang dilakukan sejauh ini telah terfokus dalam pengimplementasian FCP terhadap para pemasok kayu di Indonesia.
2. Analisa awal resiko rantai pasokan telah dimulai di APP China.
3. APP telah mengirim surat memberitahukan kepada seluruh pemasok kayunya di seluruh dunia untuk mematuhi FCP.
4. APP telah melakukan pelatihan satu hari kepada para pemasok global, non-pulp tentang FCP.

Kemajuan di China

APP China dan TFT China telah bertemu dengan Greenpeace China untuk mendiskusikan rencana dan prioritas untuk memulai FCP di China. Rencana Aksi awal telah disusun sebagai hasil dari berbagai diskusi dan saat ini menunggu persetujuan akhir. Detail dan kemajuan terhadap target dari Rencana Aksi tersebut akan dilaporkan lebih lanjut pada laporan-laporan berikutnya.